

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 618/Humaniora
Bidang Fokus: Sosial Humaniora/1

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**



**DINAMIKA POLITIK KABUPATEN SOLOK SELATAN:
FENOMENA RIVALITAS DAN KOLABORASI**

OLEH

DR. NOPRIYASMAN, M.HUM

NIDN 0002046402

DRS. SYAFRIZAL, M.HUM

NIDN 0007016301

DRS. ARMANSYAH, M.HUM

NIDN 0012116102

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

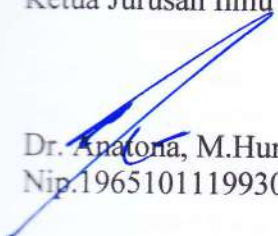
PADANG

2018

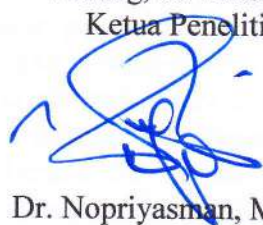
HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

Judul Penelitian	: Dinamika Politik Solok Selatan: Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi
Kode>Nama Rumpun Ilmu Peneliti	: 618/Humaniora
a. Nama Lengkap:	: Dr. Nopriyasman, M.Hum
b. NIDN	: 0002046402
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Program Studi	: Ilmu Sejarah
e. Nomor HP	: 081363486422
f. Alamat surel (e-mail)	: nopriyasman@yahoo.com
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap:	: Drs. Syafrizal, M.Hum
b. NIDN	: 0007016301
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap:	: Drs. Armansyah, M.Hum
b. NIDN	: 0012116102
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas
Lama Penelitian	: 12 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah


Dr. Anatonu, M.Hum
Nip.196510111993031002

Padang, 30 Oktober 2018
Ketua Peneliti,


Dr. Nopriyasman, M.Hum
Nip. 196404021990031001

Dekan,



Dr. Hasanuddin, M.Si.
Nip 196803171993031002

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menjelaskan bentuk-bentuk konflik politik, upaya penyelesaian konflik, bentuk-bentuk kolaborasi politik, dan gerak atau kekuatan yang dimiliki masyarakat Solok Selatan. Permasalahan itu hadir dan menampakkan diri sejak munculnya gerakan pembentukan babupaten baru Solok Selatan dan dalam masa-masa pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan teori konflik dalam menelaah berbagai konflik kepentingan yang terjadi di tengah masyarakat dan juga *koersi* yang menyatukan masyarakat atas semua hal yang menekan mereka, terutama perbuatan historis dari masyarakat Sangir dan masyarakat Sungai Pagu. Analisis konflik mengidentifikasi beragam peran otoritas (struktur) dalam masyarakat, sedangkan teori konsensus digunakan untuk menelaah integrasi nilai di tengah masyarakat tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mengacu pada tahapan metode sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Dari penelitian ini diharapkan dapat memperterang dinamika gerakan pembentukan Kabupaten Solok Selatan (2003) hingga setahun setelah peresmian Solok Selatan sebagai kabupaten baru, dengan terpilihnya Bupati definitif (2005).

Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengungkap dinamika politik yang terjadi di Solok Selatan, seperti faktor pemicu konflik, apalagi kalau dikaitkan pula pada soal perlakuan yang tidak seimbang antara berbagai kelompok kemasyarakatannya. Di sisi lain kepentingan bersama dapat pula menjadi faktor penyatu yang membawa keharmonisan antara kelompok masyarakat yang semula berseteru. Perilaku politik yang diperlihatkan masyarakat Solok Selatan tetap aktual bila dikaitkan dengan berbagai fenomena konflik politik dan kolaborasi politik pasca reformasi di Indonesia. Persoalan rivalitas elit daerah terjadi dalam soal memperebutkan penentuan ibukota Kabupaten Solok Selatan. Elit politik Sungai Pagu menginginkan ibukota ditempatkan di wilayah Sungai Pagu, sebaliknya tokoh masyarakat Sangir menginginkan pusat pemerintahan terletak di wilayah Sangir, yaitu dalam Nagari Lubuk Gadang, yang posisinya relatif berada di tengah-tengah wilayah Solok Selatan. Sementara, kolaborasi antara masyarakat Sungai Pagu dan Sangir terlihat dalam menghadapi pilkada. Pasangan Kepala Daerah yang tampil dalam pemilukada 2005 selalu berasal dari kedua kalangan kemompok masyarakat itu, dan pendukung setiap calon juga melibatkan kedua kalangan masyarakat itu. Hal itu berarti Solok Selatan telah memperlihatkan politik perimbangan, sekaligus politik integrasi.

Kata Kunci: Dinamika politik, fenomena, rivalitas, dan kolaborasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	5
1.3. Kebaruan dan Terobosan Teknologi.....	5
1.4. Luaran Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
3.1. Pendekatan Multidimensi.....	10
3.2. Metode Sejarah.....	10
BAB IV MASYARAKAT DAN WILAYAH SUNGAI PAGU/ SANGIR DI SOLOK SELATAN.....	12
4.1. Poros Sungai Pagu.....	12
4.2. Poros Sangir.....	19
BAB V DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER KABUPATEN SOLOK SELATAN.....	25
5.1. Terbentuknya Kabupaten Solok Selatan.....	25
5.2. Rivalitas Penentuan Pusat Pemerintahan.....	31
5.3. Politik Kolaborasi Pemilukada Solok Selatan.....	34
BAB VI KESIMPULAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
DAFTAR INFORMAN.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada pertengahan tahun 1998, Negara Indonesia memasuki era reformasi yang berusaha mewujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu bentuk fenomena reformasi di Indonesia adalah terjadinya tuntutan dan proses pemekaran wilayah pemerintahan di daerah. Dalam konteks itulah lahirnya beberapa provinsi baru seperti Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, dan Provinsi Banten yang dimekarkan dari wilayah Provinsi Jawa Barat.

Aspirasi dan proses pemekaran wilayah pemerintahan juga bergulir pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat pemerintahan desa. Untuk kasus Sumatera Barat tidak ada tuntutan pembentukan provinsi baru namun pada tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kenagarian yang merupakan unit pemerintahan terendah terjadi pemekaran wilayah sehingga bermunculan unit-unit pemerintahan baru. Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten baru yang terdapat di wilayah Sumatera Barat.

Pembentukan Kabupaten Solok Selatan dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 2003 tertanggal 20 November 2003. UU yang sama juga mendasari pembentukan dua kabupaten baru lainnya di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya.¹ Sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat yang juga terbentuk pada awal reformasi lebih duluan lahirnya. Serangkaian lobi yang dilakukan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal waktu itu diresponi secara positif oleh Presiden B.J.Habibie, sehingga pada tanggal 9 Oktober 1999 wilayah Kepulauan Mentawai

¹Nasution, "Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat: Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya", *Skripsi Jurusan Sejarah* (Padang:Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2009), hal. 57.

BAB V

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER KABUPATEN SOLOK SELATAN

5.1 Terbentuknya Kabupaten Solok Selatan

Setelah melalui perjuangan dan perjalanan panjang, akhirnya keinginan masyarakat Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir membentuk kabupaten sendiri terwujud, dengan keluarnya Undang-Undang No. 38 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat, yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003. Perjuangan dan perjalanan panjang sebenarnya telah dimulai oleh masyarakat kedua kecamatan jauh hari sebelumnya. Perjuangan dan perjalanan Panjang yang berakhir manis ini sebenarnya mempunyai lika-liku dan dinamika yang sangat menarik untuk dicermati. Bahkan tidak jarang perjuangan dan perjalanan panjang ini menimbulkan riak-riak pertentangan dalam masyarakat dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan berdirinya Kabupaten Solok Selatan ini.

Secara singkat, berikut ini mari kita lihat perjuangan dan perjalanan Panjang tersebut. Pada tahun 1950, bertempat di *Timbulun* Kecamatan Sangir digelar Konfrensi Timbulun, oleh masyarakat Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir. Konperensi ini dihadiri oleh pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Solok Selatan. Akan tetapi, keinginan ini belum terujud bentuknya secara kongkrit.⁶⁶ Ideologi pembentukan kabupaten sendiri itu dikenal sebagai gerakan Generasi Pertama. Sayangnya nama dari tokoh-tokoh yang mempelopori terjadi konferensi ini tidak dapat kita temukan. Hanya saja sebuah nama tentang nama baru bagi kabupaten yang akan mereka bentuk ini telah muncul, yaitu Kabupaten Sahiliran Batang Hari (SBH).⁶⁷

⁶⁶Syukrial Syukur, "Kronologis Pembentukan Kabupaten Solok Selatan", *manuskrip*, Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2), tanpa tempat dan tahun terbit.

⁶⁷Nama ini kami peroleh dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Solok Selatan dan beberapa narasumber lain, seperti H. Khairunnas mantan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan 2004/2009 dan 2009/2014 sebagai Ketua DPRD, Hj. Sastrawati